

" K U N T J I "

-ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGARA -

1952

- BAB: - 1. PERBENDAHARAAN  
2. KASADMINISTRASI  
3. UANG PEMULIHAN  
4. GADJI-GADJI  
5. HADIAH-HADIAH  
6. ISTIRAHAT  
7. PENSIUN & ONDERSTAN  
8. PERDJALAMAN DIMAS  
9. PADJAK-PADJAK  
10. PERSEKOT-PERSEKOT  
11. PERSONALIA  
12. TURAN-TURAN PENSIUN  
13. SOSIAL & PERATURAN PENGOBATAN  
14. TUNDJANGAN-TUNDJANGAN  
15. URUSAN UANG  
16. UANG TUNGGU  
17. UANG LEMBUR  
18. UANG PERSEDIAAN ( G.T.G.R. )  
19. URUSAN UMUM  
20. REORGANISASI  
21. PERALATAN/PERLENGKAPAN

-----oO-----

REPERBUKHAAN  
BAB I

(1)

P o r i h a l	Halaman	Honor
1. Pembukuan pembajaran kembali perskot2 berhubung dengan pemisahan administrasi Djawatan Radio.....	6	9
2. Pembukuan setoran2/potongan2 pada S.p.m.u.2 tahun 1952 berhubung dengan administrasi baru Djawatan Ragi Garan .....	21	20
3. Pengalihan pembajaran kepada Negara tentang ganti-rugi tanah (erfpacht) .....	25	22
4. Penjeloasaan pembajaran-2 jang memberatkan anggaran R.I. (lama) .....	27	25
5. Penjeloasaan pembajaran2 jang memberatkan anggaran R.I. (lama) dan bekas Negara2-Bagian lainnya (H.S.P. - N.I.T.) .....	47	39
6. Pembajaran gadji dan pemotongan2 iuran2 pensiun sendiri dan pensiun djanda atas gadji pegawai2 bangsa asing pada achir tahun 1951 .....	50	41
7. Djawaban atas tegoran2 tentang pembebanan pengeluaran .....	63	46
8. Perhitungan/pemungutan bea angkutan dengan kereta api .....	91	53
9. Pengembalian kelebihan padjak dengan djalan daftar penjeloasaan (verhandelingsstaat) tak dapat diterima .....	97	58
10. Pengiriman daftar ichtisar bulanan mengenai pengeluaran .....	99	60
11. Pengalihan sewa2-tarah erfpacht .....	114	69
12. Afektasi tundjangan djabatan dan tundjangan luar biasa tahun anggaran 1952 .....	116	72
13. Pembajaran gadji pegawai2 Djawatan Ragi Garan selama tahun 1951 dan dimulanya .....	119	76
14. Djangka waktu pengikaran S.P.M.U.2 .....	133	86
15. Penjeloasaan pembajaran2 jang memberatkan anggaran R.I. dahulu .....	135	88
16. Pembukuan pengeluaran mengenai Panitia Peraturan Kotjelakaan Perang .....	148	96
17. Pembukuan jumlah2 pendjualan kantong2 uang dan tong kaju .....	163	108
18. Pembebanan pengeluaran pengganti pengobatan ....)	164	110
	270	185
19. Mandat2 URIPS jang belum ditunaikan .....	165	111
20. Pengeluaran2 jang bersifat "commalg" .....	197	126
21. Pembebanan tundjangan djabatan dan tundjangan luar biasa .....	198	128
22. Perobahan tjara penjeloasaan hutang2 dari zaman pergolakan .....	208	132
23. Petundjuk2 untuk K.P.P. mengenai penjelenggaraan tata-usaha Keuangan Propinsi mulai tahun 1952 .	209	133
24. Penukaran S.p.m.u. dalam daerah Istimewa Jogjakarta dan Karosidenaan Surakarta .....	211	135
	213	136
25. Pengeluaran2 jang bersifat "commalg" .....	227	145
26. Memperpanjang masih terbukanya dinas tahun 1950 .....	229	146

Perihal	halaman	Nomor
27. Biaya untuk Rekonstruksi Nasional .....	233	150
28. Pembayaran "Riddersoldijen M.W.O." .....	234	151
29. Penagihan, pembayaran dan perhitungan hutang kepada dan piutang terhadap Negara, (diluar Negeri) b.h.d. peraturan devisen baru mulai 4-2-1952 .....	248	162
30. Perubahan pembobanan mata anggaran dilambar kedua (duplicaat) S.p.m.u. ....	256	172
31. Dinas anggaran tahun 1951 .....	261	177
32. Pengeluaran surat penagihan ongkos perdjalanann .....	267	182
33. Tanda peninjataan pemeriksaan surat portanggungandjawab .....	294	190
34. Afektasi tundjangan komahalan atas tundjangan bekas Menteri .....	309	204
35. Djangka waktu penukaran S.p.m.u. ....	309	205
36. Pemeriksaan atas pembobanan pengeluaran .....	310	206
37. Perubahan tjara menjolesaikan hutang2 dari zaman pergolakan .....	312	208
38. Penerbitan S.p.m.u. gadji bulanan pada tiap2 tanggal 27 tiap bulan .....	314	210
39. Penghentian pengiriman daftar2 portanggungandjawab kas jang tidak diperlukan .....	316	213
40. Penghematan pengeluaran uang Negara .....	332	224
41. Pengurangan 20% dari uang belandja barang tahun 1952 .....	336	22
42. Pengeluaran untuk slamatan .....	358	241
43. Pembukuan pengeluaran mengenai Panitia Peraturan Kotjelakaan Perang .....	384	250
44. Penjolsaian daftar2 gadji .....	421	324
45. Pengiriman daftar C.8 .....	451	348
46. Pembobanan pengeluaran b.h.d. telah diterimanya "Daftar Kepala2 Pembukuan 1952" (hoofdenlijst) untuk Kementerian Urusan Pegawai .....	464	357
47. Penundjukan pegawai2 jg dikuasakan utk menandatangani S.p.m.u.2 dll. c.q. s.k.p.v. ....	476	364

B.A.P II

KASADNINISTRASI

1. Pengiriman surat portanggungandjawab .....	3	3
2. Aturan pengiriman uang .....	62	45
3. Penjelidikan tandatangan/apakah seorang pensiunan jang namanya tertjantun dalam daftar-pembayaran masih hidup atau tidak, adalah termasuk tugas kewadjiban Kas Negeri .....	93	54
4. Pengembalian kelebihan padjak dengan djalan daftar-perhitungan (verhandolingsstaat) tidak dapat diterima .....	97	58
5. Keterangan2 uang kas pada Kas Negeri (Rp. 500.- koatas) .....	127	80
6. Djangka waktu penukaran S.p.m.u. ....	133	86
7. Penundjukan fg. Kepala Kantor Kas Negeri apabila Kepalanja sakit .....	157	106

P e r i h a l	halaman	Nonor
8. Pendjualan kantong2 uang dan tong kaju .....	163	108
9. Kedudukan Kas Negeri di Tasikmalaja mulai 1 Djuni 1952 .....	164	109
10. Mandat2 URIPS jang belum ditunaikan .....	165	111
11. Pengiriman daftar-mingguan keadaan uang-kas, salinan buku-kas umum dan daftar portelaan uang-kas .....	172	113
12. Penukaran S.p.m.u. dalam daerah Istimewa Jogjakarta dan karesidenan Surakarta .....	213	136
13. Pendjualan tong2 kaju bekas uang logam .....	227	144
14. Tanda perujataan pemeriksaan surat pertanggungan-djawab .....	242	156
15. Penjetoran uang kertas Pemerintah dari Rp. 0.25 dan Rp.0.10 di Kas Negeri oleh Kantor .....	242	157
16. Surat permintaan untuk membeli Wesol Pemerintah (model KK 45) .....	252	166
17. Perubahan pembebanan mata anggaran dilembar kedua (duplicaat) S.p.m.u. ....	256	172
18. Djangka waktu penukaran S.p.m.u. ....	309	205
19. Mentjabat nomor dan huruf seri uang kertas jang dikirim .....	315	212
20. Penghentian pengiriman daftar2 pertanggungan-djawab kas jang tak diperlukan .....	316	213
21. Perintjian sisa uang kas ongkos kantor .....	320	218
22. Buku-kas tabellaris .....	339	230
23. Pengiriman segi2 daftar pengadji tentang S.p.m.u.2 untuk Kantorpos2 Pembantu .....	345	235
24. Pertanggungan-djawab Bagian XV .....	355	239
25. Penjelasan bulanan .....	393	293
26. Uraian dalam segi2 dari buku-kas2 pembantu .....	427	328
27. Penaklukan "Check-writer" baru .....	466	358
28. Penundjukan pegawai2 jang dikuasakan untuk menandatangani S.p.m.u.2 dll. c.o. s.k.p.p. (c.o.b.).	476	364

## BAB III

UANG PEMULIHAN

1. Peraturan2 pemberian uang pemulihan .....	64	47
2. Dasar perhitungan uang pemulihan untuk anggota tentara .....	153	102
3. Pembayaran uang pemulihan .....	443	340
	455	351

## BAB IV

GADJI-GADJI

1. Gadji pegawai bangsa asing sebelum ada penjosaian .....	5	8
--	---	---

Perihal	halaman	Nomor
2. Pembajaran gadji dan pemotongan iuran <sup>2</sup> pensiun sendiri dan pensiun djanda atas gadji pegawai <sup>2</sup> bangsa asing pada achir tahun 1951 .....	50	41
3. Pembajaran gadji pegawai <sup>2</sup> Negeri Garam selama tahun 1951 dan dinukanja	119	76
4. Peraturan tentang pembajaran gadji Perdana Menteri (menteri <sup>2</sup> ) .....	130	83
5. Gadji jang kelebihan dibajar selama kekerohan administrasi, dalam waktu <sup>2</sup> belakangan setelah clash ke-II .....	173	114
6. Pembajaran gadji pegawai <sup>2</sup> Negeri didaerah dollar b.h.d. peraturan dovison baru mulai 4-2-1952 ..	174	116
7. Pembikinan daftar gadji pegawai Negeri mendjolang peraturan pensiun umum jang baru bagi seluruh pegawai Negeri .....	179	119
8. Kenaikan gadji dengan 20% x gadji pokok menurut P.P. no. 25 tahun 1952 .....	206	131
	)	221
	)	228
	)	254
9. Pelaksanaan P.P. no. 25/1952 (kenaikan gadji pokok P.G.P. dengan 20%) .....	235	152
10. Nasib keluarga pegawai jang hilang sebelum tg. 1-1-1951 (tentang gadjinja) .....	299	196
11. Penghasilan pekerdja harian pekerdja <sup>2</sup> Kementerian Keuangan di Djakarta-Raya .....	304	201
12. Idem di Tandjongperak (Surabaya) .....	307	203
13. Kodudukan dan penghasilan pegawai Negeri jang ditahan karena alasan <sup>2</sup> politik .....	334	226

## BAB V

HADIAH LEBARAN DSB.

1. Dasar gadji pembajaran hadiah Lebaran (tidak berubah karena kenaikan dsb.) .....	2	1
2. Pemberian hadiah Imlek .....	3	
3. Hadiah Tahun Baru kepada pegawai Negeri Warga Negara Indonesia (Belanda) .....	26	23
4. Pembajaran honorarium guru <sup>2</sup> jang mengadjar pada waktu sore .....	101	61
5. Hadiah tahun Baru kepada pegawai <sup>2</sup> Propinsi ....	122	78
6. Penghapusan hadiah <sup>2</sup> lebaran, - Tahun Baru dsb..	206	131
7. Hadiah Lebaran bagi pegawai Negeri jang hanja bekerdja selama 1 bulan .....	314	211

BAB VI

I S T I R A H A T

P e r i h a l	halaman	Nomor
1. Kemungkinan untuk beristirahat keluar negeri bagi pegawai Negeri bangsa asing yang digadji menurut P.G.P. 1948 .....	250	163
2. Peraturan istirahat (ontspanningsverlof) - Staatsblad 1934 no. 479 - .....	494	370

## BAB VII

P E N S I U N & O N D E R S T A N

1. Pembayaran uang muka atas pensiun dsb. oleh kantor2 sosial kabupaten .....	15	16
2. Pembayaran uang muka atas pensiun atau tundjangan untuk pegawai Negeri dari Djawatan P.T.T. ....	16	17
3. Surat2 keterangan pensiun/tundjangan kepada pensiunan sebagai tindakan untuk sementara .....	22	21
4. Pembayaran tundjangan Riddersoldij dan M.W.O. ...	29	26
5. Pembayaran uang muka atas pensiun djanda/tundjangan anak jatin-piatu .....	35	32
6. Penjerahan pekerdjaan mengenai urusan pensiun bekas militer bukan anggota APRI kepada Dinas Pensiun Militer di Bandung .....	37	33
7. Pembayaran uang muka atas pensiun dan tundjangan yang dipersamakan dengan pensiun kepada bekas pegawai Djaw. Rogi Garam .....	44	37
8. Pembayaran uang muka atas pensiun kepada bekas pegawai Negeri yang tinggal didaerah Straitsdollar .....	46	38
9. Pembayaran pensiun kepada para pensiunan yang berdiar didaerah Propinsi Sunda Ketjil oleh K.P.P. Makassar .....	87	51
10. Tundjangan kepada bekas anggota/ketua B.P. KNIP R.I. ....	96	57
11. Tata-usaha pembikinan daftar-pembayaran pensiun dan tundjangan daerah Djawa Tengah .....	99	59
12. Perubahan2 susunan keluarga dsb. yang mengakibatkan perubahan2 dalam pembayaran pensiun/onderstan bekas anggota tentara .....	146	94
13. Pembayaran pensiun dan tundjangan R.I. mengenai masa sebelum Djuli 1949 .....	167	112
14. Surat2 keterangan b.h.d. pembayaran pensiun, bertalian dengan pembaharuan surat keputusan tentang penetapan djumlah pensiun tsb. ....	176	117
15. Kosalahan2 dalam daftar-pembayaran pensiun dsb.	186	122
16. Pembayaran pensiun2 dsb. yang telah digadaikan.	193	125
17. Pendjelasan tentang pensiun istimewa .....	223	141
18. Pembayaran Riddersoldijen M.W.O. ....	234	151
19. Pembayaran uang muka atas pensiun/tundjangan untuk bekas peg. Negeri Djaw. P.T.T. ....	237	154
20. Pembayaran pensiun/tundjangan R.I. serta uang kurnia sebelum bulan Djuli 1949 .....	245	160
21. Pembayaran pensiun/tundjangan kepada bekas anggota KNIL yang dipekerdjakan pada APRI .....	240	155

Perihal	halaman	Nomor
22. Penghentian pembajaran pensiun b.h.d. belum dikeluarkan surat keputusan jbs. ....	253	167
23. Turunan surat keputusan pensiun/onderstan utk bekas anggota KNIL dan keluarnya yang dikeluarkan oleh Dinas Pensiun Militer .....	258	175
24. Penjerahan pekerdjaan mengenai urusan pensiun bekas militer bukan anggota APRI kepada Direktur D.A.A.D. ....	264	180
25. Hak pensiun menurut pasal 5 ayat 1 huruf d P.P. R.I. (dahulu) no. 34/1949 .....	328	222
26. Pensiun/tundjangan kepada bekas anggota "angkatan Laut"/djanda2 dan anak2. jatim-piatu .....	389	256
27. Penjotoran/pengiriman daftar2 pertanggungjanaan-djawab iuran2 untuk pensiun anggota tentara dan anak jatim-piatunya .....	395	296
28. Pemusatan pembajaran pensiun dsb. pada Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung ....)	410	307
.....)	415	318
.....)	417	319
29. P.P. no. 19 tahun 1952 terhadap para pensiunan (pembayar iuran berdasarkan peraturan lama) ....)	448	345
30. ....)	449	346
31. Surat keputusan tentang pemberian pensiun djanda (P.P. no. 19/1952) dan pensiun sendiri (U.U. no. 20/1952) .....	451	349
32. Kenaikan pensiun/tundjangan bekas pegawai Negeri Sipil dan djanda serta anak jatim-piatu .....	495	371
.....)	509	372

BAB VIII

PERDJALANAN DINAS

1. Perdjalananan djabatanan keluar Negeri .....	141	92
2. Pengeluaran surat pengalihan ongkos2 perdjalananan .	267	182
3. Perdjalananan untuk mengikuti Kurusu yang diselenggarakan oleh Kementerian/Djawatan .....	296	193
4. Penjerahan pekerdjaan pemberian, pembajaran dan pengawasan uang persediaan guna eksploitasi kendaraan bermotor .....	317	214
5. Peraturan sewa-beli tentang kendaraan bermotor kepunyaan dinas .....	366	246
6. Peraturan penetapan harga kendaraan bermotor kepunyaan dinas .....	373	249
7. Penjabutan peraturan tentang pemakaian kendaraan bermotor milik Pemerintah untuk keperluan partikulir .....	385	252
.....)	408	305
8. Penerbitan beserta tata-ucuh surat2 pengalihan Djawatan Perdjalananan .....	387	253
9. Pemeliharaan kendaraan bermotor sebelum pondjua-lannya .....	488	366

PADJAK-PADJAK

P e r i h a l	halaman	Nomor
1. Pengembalian kelebihan pajak dengan jalan daftar penjabaran (verhandelingsstaat) tidak diperkenankan .....	97	58
2. Pemungutan pajak-peralihan atas pensiun dan uang-tunggu yang dibayar oleh R.I. kepada orang2 yang dipekerjakan pada Komisariat Agung Koradjaan Nederland .....	112	67
3. Pembebasan pajak atas jaminan makan yang diberikan sudah masak (jadi bukan uang makan) diasrama/kapal untuk anggota kepolisian .....	117	74
4. Pembebasan pajak-peralihan atas uang-tunggu atau pensiun dari orang2 yang dipekerjakan pada Komisariat Nederland di Indonesia .....	125	79
5. Pengembalian kelebihan pajak .....	133	85
6. Pajak atas tundjangan ikatan-dinas (poladjar) yang diberikan kepada tjalon pegawai Pemerintah ..	135	89
7. Pembebasan dari pajak atas tundjangan jabatan ..	151	99
8. Pengembalian kelebihan pajak didalam wilajah pembajaran K.P.F. Jogjakarta .....	156	105
9. Penghapusan Kantor Inspeksi Keuangan di Manado, dan pembentukan Kantor yang serupa di Singaradja ..	199	129
10. Tjara menjelenggarakan pemungutan pajak atas uang makan anggota kepolisian .....	214	137
11. Pembukuan pajak-peralihan ex-pajak bumi berko-hir .....	262	178
12. Penurunan tarif pajak-peralihan mulai 1 Djanuari 1952 .....	294	191
13. Tindakan darurat terhadap para wadajib-pajak yg ada diluar Negeri .....	297	194
14. Tarif pajak-peralihan/upah didacrah dollar (Riau) .....	320	217
15. Potongan pajak bulan Djuli dan Agustus 1952 ..	325	220
16. Potongan pajak-peralihan 1952 .....	333	225
17. Potongan pajak-peralihan atas pensiun dsb. bulan Agustus 1952 .....	345	236
18. Pembebasan dari potongan pajak atas sebagian dari tundjangan kepada Ketua dan Wakil2 Ketua D.F.R. ....	361	244
19. Pengembalian pajak-peralihan tahun 1952 terhadap wadajib-pajak yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya .....	372	248
20. Arti wadajib-pajak baru .....	392	292
21. Pengembalian pajak-peralihan tahun 1952 kepada wadajib-pajak pegawai Negeri yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya .....	409	306
22. Tjara penjelenggaraan pemungutan pajak atas tundjangan uang makan anggota kepolisian .....	418	320
23. Pembebasan sebagian dari tundjangan kepada wakil2 Ketua D.P.R. R.I. dari potongan pajak .....	421	323
24. Potongan pajak-peralihan atas gadji bulan Nopem- ) bor dan Desember 1952 .....	423	326
25. Potongan pajak-peralihan atas gadji bulan Nopem- ) bor dan Desember 1952 .....	430	331

PERSEKOT2

Perihal	halaman	Nomor
1. Pembayaran kembali persekot2 b.h.d pemisahan administrasi Djawatan Radio .....	6	9
2. Pembayaran uang muka atas pensiun dsb. kantor2 sosial Kabupaten .....	15	16
3. Pembayaran uang muka atas pensiun atau tundjangan pegawai Negeri Djawatan P.T.T. ....	16	17
4. Pembayaran uang muka atas pensiun djanda/-dan tundjangan anak jatin-piatur .....	35	32
5. Pembayaran uang muka atas pensiun dan tundjangan yang diporsamakan dengan pensiun kepada bekas pegawai Negeri Djaw. Regi Garam .....	44	37
6. Pembayaran uang muka atas pensiun kepada bekas pegawai Negeri didaerah Straits-dollar .....	46	38
7. Persekot tidak berbunga kepada para Menteri untuk persekot rumah tangga .....	104	63
8. Pemberian persekot kepada segonap pegawai so- besar 50% pendapatan bersih bulan Mei 1952, bertalian dengan kenaikan gaji dengan 20% pokok gaji, perobahan pembagian rayon2 dan kenaikan persentasi rayon2 tundjangan kema- halan, menurut P.P. no. 24, 25 dan 26 tahun 1952 .....	206 267	131 181
9. Pembayaran uang muka atas pensiun/tundjangan untuk bekas pegawai Negeri Djawatan P.T.T. ..	237	154
10. Persekot kepada pekerdja2 harian pada Djawa- tan/Perusahaan2 Pemerintah b.h.d. lebaran ...	244	159
11. Persekot gaji dalam bulan Djuli 1952 (30%)..	263	179

## BAB XI

PERSONALIA (SOAL KEPEGAWAIAN)

1. Perhitungan masa kerdja .....	10	11
2. Masa kerdja dalam ketentaraan (tentara peladjar	20	19
3. Pemindahan pegawai kolain Kementerian/Djawatan	26	23
4. Arti masa kerdja menurut P.P. no. 59/1951 (so- bagai tentara peladjar) .....	34	30
5. Keangkatan diluar kompetensi Kepala Djawatan .	34	31
6. Kedudukan pegawai Negeri bangsa asing pada achir tahun 1951 .....	50 260	41 176
7. Perundang-undangan tentang soal2 kepegawaian .	88	52
8. Pelaksanaan P.P. no. 59/1951 mengenai pengang- katan pegawai tetap .....	101	62
9. Masa kerdja sebagai kepala kampung ( lurah , tjarik dsb.) .....	128	81
10. Masa kerdja pada daerah2 otonoom atau Swapra- dja, .....	146	93
11. Peraturan pemindahan koluár Djawa terhadap pegawai baru yang ditempatkan diluar Djawa ...	152	101

(10)

IURAN-IURAN PENSIIUN (sambungan)

P e r i h a l	halaman	Nomer
4. Iuran <sup>2</sup> pensiun anggota D.P.R./Pegawai Negeri non-aktif .....	210	134
5. Iuran ekstra Dana Pensiun b.h.d. P.P. no. 25 tahun 1952 .....	228	145
6. Iuran biasa b.h.d. dengan kenaikan gaji 20% (P.P. no. 25/1952) .....	232	148
7. Iuran biasa Dana Djanda b.h.d. P.P. no. 19 tahun 1952 .....	251	165
8. Potongan iuran luar biasa b.h.d. P.P. 25/1952 .....	254	169
9. Iuran biasa, nikah dan iuran tambahan b.h.d. kenaikan gaji P.P. 24, 25 dan 26 th. 1952 ..	302	200
10. Iuran biasa Dana Pensiun djanda menurut P.P. no 19 tahun 1952 .....	341	231
11. Pembayaran iuran Dana Djanda bagi mereka jg dahulu berlaku ketentuan <sup>2</sup> dalam Weduwen-en Vozenfonds Regelingen Europese Burgerlijke Ambtenaren .....	342	232
12. Iuran luar biasa jang harus dipotong b.h.d. kenaikan gaji .....	463	356

BAB XIII

SOSIAL (PEMELIHARAAN PEGAWAI)

1. Permintaan tinggal dihotel/moss dari pegawai jang ditempatkan kedudukannya sudah mempunyai perumahan .....	150	98
2. Peraturan pengobatan dan pembagian kelas di-rumah sakit .....	158	107
3. Memperpanjang waktu pembagian beras untuk pegawai Negeri (P.P. 67/1951) .....	215	138
4. Pembebasan penjitjilan pembayaran sepeda, dji-ka hilang atau dirampas .....	236	153
5. Peraturan pondjualan spoda kepada para pegawai .....	271	186
6. Perhitungan biaya perawatan bagi para pegawai-rechthobbenen .....	291	187
7. Pembatasan perasukan pegawai dalam hotel/moss dengan pemberian tundjangan pemondokan, menurut Peraturan 60 - 70% .....	322	219
8. Sociale voorzieningen kepada bekas anggota tentara dan keluarganya .....	387	254
9. Biaya hotel jang harus menjelaskan kamar dan tidak memberi makan .....	447	343
10. Tundjangan beras berupa uang untuk tahun 1951 .....	461	354

BAB XIV

TUNDJANGAN-TUNDJANGAN

1. Tundjangan anak/-kemahalan bagi jang kawin kepada pegawai wanita, isteri kedua jang mempunyai gaji pokok lebih besar dari suaminya ..	397	297
--	-----	-----

